



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
6. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan Kebijakan yang ditetapkan.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 2

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah adalah dalam rangka untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah adalah untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ;dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Setiap instansi Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja setiap instansi pemerintah dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI TORAJA UTARA,

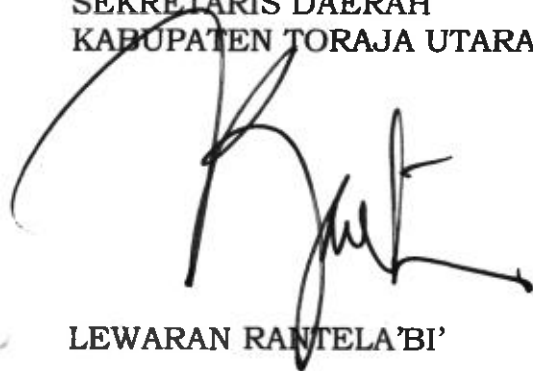


FREDERIK BATTI SORRING

A	
SEN	
IG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 34 TAHUN 2015 TANGGAL 11 DESEMBER 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- VISI** : **Pariwisata Penggerak Pemerataan dan Peningkatan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara**
- MISI 1** : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat**
- Tujuan : 1. Tata pemerintah yang baik
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga-Lembaga Pemerintah

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan	untuk menilai ketersediaan materi/bahan pengendalian dan evaluasi untuk peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda
		Tersusunnya RKPD	Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda
		Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten	Untuk menilai peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda
		prosentase SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu	untuk menilai ketersediaan materi/bahan pengendalian dan evaluasi untuk peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian RKPD dengan usulan Musrenbang	Untuk menilai peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pembangunan Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan sampah	untuk mengukur kualitas pengelolaan sampah	BPPLH dan Dinas Tata Ruang & Pemukiman
2	Terlaksananya pengujian peningkatan pengendalian polusi	Menurunnya Pencemaran status mutu air/Kualitas air	Untuk mengukur kualitas pengelolaan lingkungan hidup	BPPLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
3	Terlaksananya pembangunan perlindungan dan konservasi	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Untuk mengukur konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air	BPPLH dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4	Terlaksananya pembangunan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Untuk mengukur kualitas pengelolaan lingkungan hidup	BPPLH
5	Terlaksananya pembangunan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Tesedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Untuk menilai penenuhan sarana dan prasarana persampahan	BPPLH dan Dinas Tata Ruang & Pemukiman
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
7	Meningkatnya pelayanan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk	Rasio penduduk dari 242.215 Penduduk yang ber-KTP Nasional berbasis NIK persatuan penduduk	Mengukur tingkat pelayanan administrasi kependudukan	Disdukcapil
		Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Mengukur tingkat pelayanan administrasi kependudukan	Disdukcapil
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
1	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga	Meningkatnya Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif sebesar 65% pada tahun 2016	Mengukur jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif	BKB dan PP
				BKB dan PP
				BKB dan PP
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% pada tahun 2016.	Mengukur ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	BKB dan PP
				BKB dan PP
URUSAN SOSIAL				
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Prosentase jumlah anak terlantar yang berhasil dibina, baik di dalam maupun diluar panti	Menilai penanganan PMKS	Dinsos Naker Trans
		Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Menilai penanganan PMKS	Dinsos Naker Trans
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Cacat, Eks trauma dan Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima Jaminan Sosial	Menilai penanganan PMKS	Dinsos Naker Trans
3	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang direhabilitasi	Menilai penanganan PMKS	Dinsos Naker Trans
		6 Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	Menilai penanganan PMKS	Dinsos Naker Trans

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	Tercapainya peningkatan kompetensi semua anggota Satpol PP & Linmas	Anggota Sat.Pol PP & Linmas Selesai Mengikuti Pendidikan di SPN Batua Makassar.	Mengukur kualitas tenaga Sat.Pol PP dan Linmas	Sat.Pol PP & Linmas
2	Pencapaian Perda & Perbup dapat di tegakkan di tengah2 masyarakat	Jumlah PPNS untuk melakukan Penegakan Perda & Perbup	Mengukur tingkat ketersediaan PPNS	Sat.Pol PP & Linmas
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
1	Aktifnya pihak eksekutif untuk mengajukan ke DPRD berbagai	40 buah PERDA selesai disahkan antara Eksekutif dengan Legislatif	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	Mengukur Kualitas tenaga struktural	BKPP
		Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional	Mengukur kualitas tenaga fungsional	BKPP
3	Peningkatan Mutu Pelayanan dari Aparatur Pemerintah	Jumlah SKPD yang memiliki jabatan fungsional	Mengukur tingkat ketersediaan jabatan fungsional	BKPP
		Jumlah jabatan struktural/eselonering yang terisi	Mengukur tingkat ketersediaan jabatan struktural	BKPP
4	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, khusus/kasus, monitoring dan tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah	Menilai pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah	Inspektorat
		Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan pemerintah	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Inspektorat
		Persentase Tindak Lanjut hasil temuan pemeriksaan	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Inspektorat
5	Terfasilitasinya Pelatihan bagi bagi Aparat Pengawasan	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan	Mengukur kualitas sumber daya aparatur pengawasan	Inspektorat
6	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Jumlah Ranperda yang disusun	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Setda
		Semua SKPD melaksanakan pelayanan Publik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Setda

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
		% kasus pengaduan yang ditangani	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Setda
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1	Tercapainya Sarana dan Prasarana Pasar yang memadai, Pembinaan IKM serta pengawasan dan perlindungan konsumen	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Mengukur tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah	Perindagkop - UMKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang tersedia	Mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pasar	Perindagkop - UMKM
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
1	Peningkatan mutu administrasi kearsipan pemerintah daerah	Meningkatnya tertib administrasi kearsipan	Menilai pengelolaan kearsipan	Perpustakaan dan Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : Pariwisata Penggerak Pemerataan dan Peningkatan
MISI 2 : Mengakselerasi dan mempercepat laju pembangunan di segala bidang

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas
 2. Menyediakan dan
 3. Meningkatkan produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan,
 4. Meningkatkan Kualitas
 5. Meningkatkan kualitas

NO SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data	
1	2	3	4	
URUSAN PENDIDIKAN				
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Mengukur peningkatan angka partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
		a). APK SD/MI		
		b). APK SMP/MTs		
		c). APK SMA/MA		
		Angka Putus Sekolah (APS)	Mengukur peningkatan angka partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
		a). APS SD/MI		
		b). APS SMP/MTs		
		c). APS SMA/MA		
		Pembukaan satap SD dan SMP	Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Dinas Pendidikan
		Sekolah memiliki sarana dan prasarana	Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Dinas Pendidikan
		Jumlah guru sekolah yang diperlukan terpenuhi	Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Dinas Pendidikan
		a). PAUD		
		b). SD/MI		
		c). SMP/MTs		
d). SMA/MA				
Pembinaan Kelompok Kerja Guru	Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Dinas Pendidikan		
a). TK				
b). Guru SD/MI				
c). Guru SMP/MTs				
d). Guru SMA/MA				
e). SMK				
Persentase guru yang bersertifikasi kompetensi	Mengukur peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Dinas Pendidikan		
1). TK				
2). SD/MI				
3). SMP/MTs		Dinas Pendidikan		
4). SMA/MAN				
5). SMK				
URUSAN PEKERJAAN UMUM				
1	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Pembangunan jalan sepanjang 20 km	Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Pemeliharaan jalan sepanjang 100 km	Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

NO SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
		Pembangunan jembatan 500 m	Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Pemeliharaan jembatan 100 m	Mengukur pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi dan air Baku	Pembangunan daerah irigasi sebanyak 25 DI dan 3 Daerah Air Baku	Mengukur pemenuhan infrastruktur jaringan irigasi	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Pemeliharaan Daerah Irigasi Sebanyak 50 DI dan 2 Daerah Air Baku	Mengukur pemenuhan infrastruktur jaringan irigasi	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta perbaikan perubahan yang menyeluruh	Persentase penanggulangan bencana alam yang ditangani	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	BPBD
		Persentase penanggulangan bencana kebakaran yang ditangani	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	BPBD
URUSAN PENATAAN RUANG				
1	Terlaksananya penataan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya	Jumlah Rencana tata ruang wilayah Toraja Utara (RTRW, RDTRK, RTRK)	Menilai adanya konsistensi dalam penerapan aturan tata ruang	Distakim
2	Terlaksananya peningkatan lingkungan sehat permukiman yang tertata	Terangkutnya sampah kawasan kota Rantepao dan hinterlandnya 140 m ³ / hari (Kec. Rantepao, Kec. Kesu' dan kec. Tallunglipu).	untuk mengukur peningkatan pelayanan persampahan	Distakim
		Terbangunnya Jaringan Air Bersih 114 Lembang / Kelurahan	Menilai tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih	Distakim
		6 Terbangunnya Santasi Prasarana Umum MCK Permukiman sebanyak 59 Lembang / Kelurahan	Menilai tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi	Distakim
		8 Terbangunnya sarana prasarana perkantoran (Kantor Bupati dan 10 kantor Kecamatan)	Menilai tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perumahan	Distakim
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Terwujudnya koordinasi Semua bidang	Tersediaan dokumen kajian dan penelitian	Menilai ketersediaan dokumen kajian dan penelitian	Bappeda
URUSAN KETENAGAKERJAAN				
1	Pelatihan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Berkualitas dan Berdayaguna	Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

NO SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kessos Masyarakat	Jumlah Yayasan Pelaku Usaha Kessos yang Beroperasi	Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan melalui Usaha Ekonomi Produktif	Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Panti	Jumlah Panti yang Beroperasi Secara Maksimal	untuk menilai penanganan PMKS	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
4	Pemberdayaan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
RUSAN TRANSMIGRASI				
1	Tersedianya Permukiman Transmigrasi Bagi Keluarga Miskin	Tersedianya jumlah permukiman baru yang layak	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		Jumlah Sarana dan Prasarana UPT yang terbangun	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar	Prosentase Prasarana Penunjang LLAJ (Halte, guard drill)	Menilai pemenuhan sarana dan prasarana penunjang LLAJ	Dishubko minfo
		Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten / kota	untuk menilai pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat	Dishubko minfo
2	Peningkatan Kualitas SDM dalam Restrukturisasi Kelembagaan	Prosentase Peningkatan Kualitas SDM dibidang transportasi	untuk menilai peningkatan SDM di bidang transportasi	Dishubko minfo
		Tersedianya perda tentang parkir	mengukur peningkatan pelayanan angkutan	Dishubko minfo
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi	Meningkatnya jumlah sarana IT dan jenis media informasi yang digunakan (FM, Tabloid, Web)	Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Dishubko minfo, humas setda
		Terjalannya kerjasama dengan mass media (media cetak dan elektronik)	Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Dishubko minfo dan humas setda
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	Tersedianya sarana dan Prasarana Perkantoran yang memadai	Prosentase SKPD tingkat Kabupaten, Kecamatan dan jajaran vertikal yang memiliki gedung Kantor	Mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam memberikan pelayanan	Setda

NO SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Tahun dasar sebesar Rp 12.714.888.450,	Meningkatnya PAD setiap Tahun rata-rata sebesar 16%,	Mengukur Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	DPPKAD
	Menigkatnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah prov sul-sel sebesar Rp. 9.168.070.700,-	Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Prov. Sul-Sel sebesar rata-rata 17%	Mengukur Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	DPPKAD
	dan pendapatan dari Pemerintah Pusat Sebesar Rp. 373.266.530.000,-	Pendapatan dari Pemerintah Pusat rata-rata sebesar 10%.	Mengukur Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	DPPKAD
	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, serta terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	Pada tahun ke 5 Opini pengelolaan keuangan mencapai WTP	Menilai kinerja pengelolaan keuangan kabupaten	DPPKAD
URUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1	Terselenggaranya pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan terpeliharanya budaya, kearifan lokal Toraja Utara	Meningkatnya penataan objek wisata dan situs purbakala terpelihara dengan baik	Menilai efektivitas dan pengelolaan pariwisata	Disbudpar
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata	Menilai efektivitas dan pengelolaan pariwisata	Disbudpar
URUSAN KEPEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah peserta yang telah mengikuti pembinaan kepemimpinan (Paskibraka)	Menilai kualitas SDM Paskibraka	Dinas Pemuda & Olahraga
		Jumlah Cabang Olah raga yang aktif	Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana olah raga di daerah	Dinas Pemuda & Olahraga
URUSAN KETAHANAN PANGAN				
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat.	Persentase peningkatan produksi pangan lokal	Mengukur peningkatan produksi pangan lokal	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan dinas pertanian

NO SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
		Presentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Mengukur peningkatan produksi pertanian	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan dinas pertanian
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah masyarakat lembang / kecamatan / kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan SDA dan TTG	Menilai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG	BPMP
		Terlaksananya Pendataan masyarakat yang menggunakan alat/bahan TTG	Menilai partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat/bahan TTG	BPMP
		Terlaksananya Gelar TTG Nasional	Menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan	BPMP
URUSAN PERTANIAN				
1	Terwujudnya/terlaksananya pengembangan dan peningkatan tanaman pangan, hortikultura dan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Mengukur tingkat produksi pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Adanya Pengembangan dan meningkatnya hasil-hasil produksi perikanan	meningkatnya produksi perikanan	Mengukur tingkat produksi perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PETERNAKAN				
1	Meningkatkan populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak meningkat sebanyak :	Mengukur tingkat produktivitas usaha ternak daerah	Dinas Peternakan
		- Kerbau kenaikannya sampai akhir tahun RPJMD =7.700 ekor (40%)		
		- Sapi '60%		
		- Kuda '60%		
		- Kambing '60%		
		- Babi '60%		
		- Ayam (Pedaging, buras, Petelur)' 75%		
		- Itik '75%		


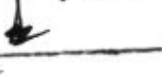

NO SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait & Sumber Data
1	2	3	4	5
URUSAN KEHUTANAN				
1	Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 10.084,5 Ha dan di luar kawasan hutan 35.845,9 Ha	Persentase lahan kritis yang telah direhabilitasi	Mengukur tingkat pengelolaan dan pelestarian hutan dan lahan	Dishutbun
2	Tercapainya produksi dan mutu yang tinggi dalam pengelolaan hasil hasil perkebunan	Persentase peningkatan hasil produksi Kopi Arabika Toraja.	Mengukur tingkat produksi kopi arabika Toraja	Dishutbun
URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI				
1	Menciptakan pengelolaan dan pengusahaan potensi energi dan sumber daya mineral secara tertib dan ramah lingkungan.	Jumlah perijinan dan yang diterbitkan	Mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Distamben
		Tersedianya data potensi energi dan sumber daya mineral	Menilai ketersediaan data tentang potensi energi dan sumber daya mineral	Distamben

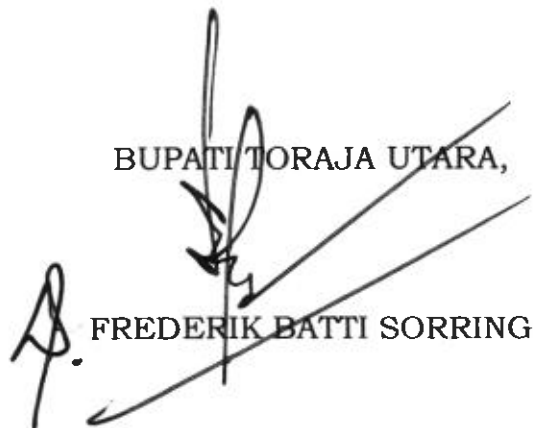
INDIKATOR KINERJA UTAMA

- VISI** : **Pariwisata Penggerak Pemerataan dan Peningkatan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara**
- MISI 3** : **Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Toraja Utara**
- Tujuan** : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi
 2. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat
 3. Meningkatkan kualitas, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai religius
 4. Meningkatkan kapasitas lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat
 5. Memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait dan Sumber Data
1	2	3		5
URUSAN KESEHATAN				
1	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringan	Sarana dan Prasarana kesehatan dasar memadai	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
2	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa / RS Paru-paru dan RS mata	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Toraja Utara telah tersedia	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
3	Terciptanya Lingkungan Sehat	Lingkungan Sehat di wilayah Kabupaten Toraja Utara	untuk menilai penurunan jumlah lingkungan kumuh	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya gizi masyarakat	Gizi Masyarakat Meningkat	Mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Meningkatnya Kesehatan keluarga	Kesehatan Keluarga meningkat	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit	Penyakit menular dapat dicegah	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya pengawasan sediaan farmasi dan makanan	Pengawasan sediaan farmasi dan makanan	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
8	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang memadai	Prosentase ketersediaan obat dan vaksin	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan
9	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar	Sarana Kesehatan yang terakreditasi	Mengukur tingkat layanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Alasan	SKPD Terkait dan Sumber Data
1	2	3		5
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
1	Terlayannya hak-hak perempuan dan anak	Cakupan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 50% pada tahun 2016.	Mengukur tingkat layanan perempuan dan anak korban kekerasan	BKB dan PP
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1	Tercapainya pembinaan usaha-usaha masyarakat dalam rangka membentuk Koperasi Serba Usaha	Jumlah Koperasi Aktif	Menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan	Perindagkop - UMKM
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	Terciptanya pembinaan kesatuan bangsa dalam rangka pemeliharaan situasi politik dan kerukunan yang kondusif	Menurunnya jumlah konflik dan gangguan kamtibmas	Menilai tingkat dan kenyamanan lingkungan yang kondusif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan	Menilai tingkat dan kenyamanan lingkungan yang kondusif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang Lembang/Kelurahan	Menilai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	BPMP

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	


 BUPATI TORAJA UTARA,
 FREDERIK BATTI SORRING